

**PUSH NET (WAN RUM) SERTA DAMPAKNYA  
PADA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN  
(KASUS KAMPUNG RU SEMBILAN, THAILAND SELATAN)**

---

Surmiati Ali<sup>1</sup>

**Abstract**

*This article discusses the influence of modern technology of fishing over the social life in a Muslim fishing community in South Thailand or Pattani. The advent of modern fishing technology to peoples fishing ground raises some problems in traditional fisher in Ru sembilan. Firstly, there is a drastically decreasing resource in fishing ground, so that they face difficulties in finding catchers. Secondly, their commercial access to fishing ground raises a conflict among them drives to financial lost.*

*This paper also explains the Thailand government policy in handling fisher conflict to management and conservation on aquatic resources. It seems that the Thailand Monarchic Government is considered discriminate local fisher. When people stop using dangerous catching instrument, in other hands commercial fishers keep operating in their fishing ground. It cause the conflict dragging continuously. It is not only because of poverty, but the traditional fisher can not going to work off shore.*

**Keywords:** *Nelayan; Konflik; Alat tangkap; Kesejahteraan*

**Pendahuluan**

Tulisan ini merupakan cuplikan dari hasil penelitian yang dilakukan di sebuah desa Thailand Selatan, yaitu kampung Ru Sembilan. Penelitian tersebut berkaitan dengan konflik nelayan yang terjadi karena kesenjangan teknologi penangkapan yang digunakan nelayan komersial Siam dengan nelayan tradisional kampung Ru Sembilan. Teknologi alat penangkapan ikan merupakan suatu hal yang

---

<sup>1</sup> Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI.

sangat penting dalam kehidupan nelayan karena teknologi penangkapan tersebut sangat menentukan tingkat eksploitasi nelayan. Semakin moderen alat tangkap yang digunakan oleh nelayan semakin tinggi jumlah hasil tangkapan yang diperolehnya. Sebaliknya, teknologi penangkapan tradisional tingkat eksploitasinya sangat terbatas, oleh karena itu penghasilan nelayan tradisional hanya cukup untuk kehidupan subsisten.

Pada kenyataannya produksi ikan antara nelayan komersial dengan tradisional sangat kontras. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi penangkapan modern komersial yang menggunakan alat tangkap pukat sorong atau *push net*, sebagaimana yang akan dijelaskan, tingkat eksplotasinya cukup tinggi, menyapu habis biota laut dari yang kecil sampai yang besar, dan hal ini sudah tentu mempengaruhi *sustainability* dari sumberdaya laut. Ketimpangan teknologi yang digunakan nelayan komersial dengan nelayan tradisional inilah yang seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan, karena teknologi *push net* yang digunakan nelayan komersial menimbulkan penurunan sumberdaya laut. Akibatnya nelayan tradisional kesulitan menangkap ikan di wilayah penangkapan atau *fishing ground* mereka, sehingga kehidupan nelayan tradisional tetap menjadi miskin.

Tulisan ini menjelaskan konflik yang terjadi antara nelayan tradisional kampung Ru Sembilan dengan nelayan moderen komersial Siam, penggunaan teknologi penangkapan (*push net*) serta dampaknya pada kehidupan sosial ekonomi mereka. Tulisan ini didahului dengan gambaran umum masyarakat nelayan kampung Ru sembillan sebagai nelayan tradisional, disusul dengan penjelasan, pengoperasian *push net* sebagai penyebab konflik yang berkepanjangan dan dilanjutkan dengan uraian upaya pemerintah untuk menghapuskan *push net* serta dampaknya pada kehidupan nelayan tradisional kampung Ru sembilan.

### **Gambaran Umum Kampung Ru Sembilan**

Kampung Ru Sembilan adalah sebuah kampung Melayu Muslim yang terletak di tepi teluk Pattani (Thailand Selatan). Letak kampung ini tidak begitu jauh dari kota Pattani hanya sekitar 2 km. Oleh karena itu kondisi jalan raya yang menghubungkan kampung ini dengan kota sudah sangat baik (beraspal hotmik), Sedangkan jalan yang

menghubungkan antara dusun (kampung kecil) masih berupa jalan batu kerikil yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dan sepeda. Untuk menuju ke kampung ini dapat menggunakan kendaraan roda empat. Jalan aspal yang sangat baik ini dianggap sebagai jalan protokol oleh orang kampung Ru Sembilan.

Penduduk kampung Ru Sembilan pada umumnya bangsa Melayu dan beragama Islam. Dari segi budaya mereka lebih dekat dengan Kelantan Malaysia Utara. Oleh karena itu bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Melayu dialek Kelantan seperti Yala, Narathiwat dan Satun. Akan tetapi dalam pemerintahan mereka berkomunikasi dengan bahasa Thai (Siam) sebagai bahasa negara. Orang-orang Melayu Pattani Darussalam umumnya, dan khususnya orang kampung Ru Sembilan, sejak dulu sangat loyal kepada Kerajaan Thailand dan sangat menghargai Rajanya.

Tingkat pendidikan masyarakat kampung ini masih rendah, umumnya tamatan SD atau sekolah rendah. Setelah menamatkan sekolah rendah atau SD orang tua cenderung untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke pondok pesantren yang tersebar di seluruh Thailand Selatan bahkan ke berbagai pesantren di Malaysia. Penduduk kampung yang menamatkan perguruan tinggi baru sekitar lima orang, itupun semuanya bekerja di kantor Kerajaan Thailand. Sedangkan yang masih duduk di bangku Kuliah Songkla University Pattani tiga orang dan satu orang lagi masih duduk di bangku kuliah Chulalongkorn University, Bangkok.

Jumlah penduduk sekitar 850 orang, yang terdiri dari 161 kepala keluarga. Sebagian besar mereka tinggal di rumah-rumah panggung di tepi pantai, dan sebagian lagi tinggal di rumah-rumah semi permanen yang dibangun di sepanjang jalan raya Kampung Ru Sembilan. Terdapat dua tipe bangunan rumah di Kampung ini. Nelayan yang mempunyai anak-anak yang bekerja di Malaysia, taraf hidupnya lebih dari cukup sehingga mereka dapat membangun rumah permanen. Tetapi bagi penduduk kampung yang hanya mengandalkan nelayan tradisional, rumahnya masih sederhana yaitu rumah panggung yang terbuat dari kayu baik dinding maupun lantainya. Bangunan rumah seperti ini terdapat di sepanjang pantai.

Sebagian besar masyarakat kampung Ru Sembilan bekerja sebagai nelayan tradisional, dan hanya lima orang yang kerja sebagai pegawai kerajaan, serta sembilan belas orang sebagai buruh bangunan.

Tempo dulu mereka memiliki pekerjaan sampingan bertani atau berkebun di sawah, tetapi sekarang tidak lagi karena lahan perkebunannya sudah tidak dapat ditanami, sebagai akibat dari masuknya air laut pada musim hujan.

Pekerjaan menangkap ikan sudah dilakukan turun temurun dari nenek moyang sampai hari ini. Walaupun mereka sudah mengalami kesulitan untuk menangkap ikan di wilayah penangkapan (*fishing ground*) mereka, namun untuk beralih pekerjaan bukanlah suatu hal yang mudah karena tidak mempunyai keahlian yang lain.

Alat tangkap yang digunakan oleh orang kampung Ru Sembilan sudah mengalami perubahan. Pada masa yang lalu alat tangkap utama yang digunakan adalah pukot ikan kembung karena pada masa itu terdapat musim-musim ikan, tetapi sekarang karena jenis ikan kembung sudah punah, mereka beralih ke alat tangkap pukot udang ako (*large prawn net*) dan pukot udang balacan (*smallest shrimp net*). Pukot-pukot ini terbuat dari bahan nilon. Selain itu mereka juga menggunakan pukot atau jala untuk menangkap kepiting dan cumi (*nets used for crabs and cuttlefish*). Armada penangkapan adalah *perahu kole*, yang sudah dimodifikasi dengan digerakkan oleh mesin tempel berkekuatan 5 sampai 60 tenaga kuda.

Wilayah perairan kampung Ru Sembilan (*fishing ground*) memiliki potensi perikanan yang cukup andal. Hasil kajian **Reymon** menyebutkan bahwa pada tahun 1960-an sumberdaya laut di wilayah ini masih terpelihara dengan baik dan berlimpah terutama pada musim-musim ikan, termasuk juga di perairan pantai. (Reymond, 1960). Pada masa itu masyarakat mengistilahkan “laut” sebagai “*beras cupak*” yang mengandung makna bahwa laut kaya dengan berbagai macam jenis sumberdaya yang bernilai sangat tinggi seperti kepiting, berbagai jenis udang (lobster), dan ikan, semua itu sebagai komoditi andalan bagi masyarakat kampung Ru sembilan.

Sumberdaya alam yang berlimpah tersebut menurut mereka merupakan Rahmat dari Maha Pencipta dan perlu dipelihara, sehingga pada masa lalu, kampung ini merupakan kampung yang sangat makmur. Dengan sumberdaya alam yang berlimpah baik di darat maupun di laut, orang kampung sangat mudah menangkapnya, meskipun hanya menggunakan peralatan tradisional. Kekayaan alam dan keindahan kampung Ru Sembilan ini juga dilukiskan dalam buku “*Three Poetric Language*”, yang menyebutkan sebagai; “*kampung indah permai damai*

*dengan kekayaan alam, disana keluarga bersatu hati, imam, dan penghulu bukan sembarang, budu perencah bukan kepalang terujud sudah di daerah ini“ (Madmadmarin Hassan, 1995).*

Kegiatan penangkapan ikan dilakukan baik pada siang hari maupun pada malam hari. Pemasangan jaring kepiting dan udang biasanya dilakukan pada malam hari, dan diangkat pada pagi hari. Musim kepiting atau ketam selama enam bulan pada bulan Oktober sampai Maret. Musim ikan kembung dimulai pada bulan Mei sampai Desember, namun pada saat ini terjadi penurunan sumberdaya sehingga musim kembung sudah tidak ada lagi. Begitu pula udang, maupun kepiting sudah mulai berkurang.

Perlindungan terhadap sumberdaya laut secara tradisional telah dilakukan sebelum tahun 1970-an antara lain dengan melarang menangkap penyu, kecuali mengambil telurnya. Selain itu juga dilarang menangkap gerombolan ikan kembung yang masih kecil, menggunakan alat tangkap yang merusak seperti bom, tuba, dan peralatan yang bereksplotasi tinggi. Terkait dengan larangan itu, jika terjadi pelanggaran, maka kepala desa atau tokoh adat akan memberikan sanksi berupa denda uang sebanyak 200 bath kepada si pelanggar.

Praktek pengelolaan sumberdaya laut secara tradisional tersebut sekarang sudah tidak dijalankan lagi, seiring dengan masuknya teknologi moderen ke perairan orang kampung Ru Sembilan. Kekayaan alam yang berlimpah sekitar beberapa puluh tahun yang lalu saat ini tinggal kenangan, atau hanya ada dalam ingatan orang tua-tua. Keindahan pantai dengan berbagai jenis penyu sudah tidak ada lagi, dan penurunan sumberdaya laut itu berlangsung terus menerus. Dengan berbondong-bondong nelayan komersial dari utara teluk Siam melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah teluk Pattani. Akibatnya para nelayan kampung Ru Sembilan mengalami kesulitan menangkap ikan di wilayah penangkapannya sendiri.

Sejak tahun 1980-an orang kampung Ru Sembilan sudah berulang kali membuat pengaduan baik secara tertulis maupun mendatangi pihak Kerajaan untuk melarang nelayan komersial Cina Siam beroperasi di Teluk Pattani dan di wilayah penangkapan orang kampung Ru Sembilan. Akan tetapi pengaduan itu kurang mendapat tanggapan dengan baik, sehingga orang kampung merasa kecewa dan frustrasi. Rasa kekecewaan itu diwujudkan dalam sikap tidak lagi

melindungi sumberdaya laut dari peralatan yang merusak, melainkan justru ikut menggunakannya.

Sampai tahun 2002 orang kampung Ru Sembilan yang menggunakan alat pukat dorong (*push net*) berjumlah 71 nelayan, dengan kekuatan mesin 60 PK. Jelajah penangkapan mereka bukan hanya pantai, tetapi mencapai laut dalam atau ZEE. Meskipun demikian masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap yang sederhana seperti pancing dan jala yang berukuran kecil dengan mesin yang berkekuatan 15 PK, bahkan ada sekitar 20 orang nelayan yang masih menggunakan mesin dengan kekuatan 5 tenaga kuda.

### **Pengoperasian Pukat Dorong (*Push Net*) dan Konflik Nelayan**

Alat tangkap yang dalam bahasa Siam disebut “wan rum” atau *push net*, dalam bahasa Melayu disebut pukat dorong atau pukat sodok. *Push net* yang digunakan oleh nelayan komersial lebih moderen dan sebaliknya *push net* yang digunakan oleh orang kampung Ru Sembilan lebih sederhana, namun tetap saja kedua peralatan ini berbahaya bagi keberlangsungan sumberdaya laut. Alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan komersial ini dilengkapi dengan dua batang besi, yang di pasang di kiri dan kanan kapal. Di depan kapal di pasang pukat, jika dioperasikan dengan mesin yang berkekuatan tinggi mampu mengeksploitasi berbagai jenis ikan sampai yang kecil-kecil. Sedangkan alat tangkap atau *push net* yang digunakan oleh orang kampung Ru Sembilan sangat sederhana. Peralatan itu terbuat dari dua batang bambu yang dipasang di kiri dan kanan perahu, dan mesin yang digunakan paling tinggi adalah 60 PK.

Penangkapan ikan dengan *push net* ini dilakukan oleh nelayan komersial dengan kapal-kapal moderen yang dioperasikan lima sampai sepuluh orang. Dalam kapal yang serba moderen tersebut sudah tersedia berbagai macam fasilitas untuk buruh nelayan selama melaut. Buruh nelayan biasanya berasal dari golongan Melayu. Kapal ini biasanya dilengkapi dengan peralatan canggih seperti radar, sonar, ruangan pendingin, serta komputer. Sebaliknya armada penangkapan yang digunakan oleh nelayan tradisional adalah perahu yang dioperasikan hanya dengan dua orang dan jangkauan operasinya juga disekitar perairan orang kampung (3 km dari pantai).

*Push net* mulai dioperasikan pada tahun 1970-an, oleh nelayan komersial Cina Siam dari kawasan utara teluk Siam. Dalam perkembangannya kemudian mereka mulai berdatangan ke perairan teluk Pattani, disebabkan oleh penurunan sumberdaya di teluk tersebut. Selain itu, sempitnya teluk Siam dan banyaknya jumlah nelayan komersial mengakibatkan terjadinya persaingan di antara mereka, sehingga mendorong sebagian dari mereka berpindah ke teluk Pattani untuk menjalankan kegiatan penangkapan ikan (Radwan, 2000).

Beroperasinya mereka ke teluk Pattani juga didorong oleh keberadaan sumberdaya laut yang sangat banyak dan belum dieksploitasi secara maksimal di wilayah ini. Sangat disayangkan mereka itu bukan hanya beroperasi di perairan teluk Pattani, tetapi juga memasuki perairan yang merupakan wilayah penangkapan orang kampung Ru Sembilan. Karena itu terjadilah perebutan sumberdaya yang pada akhirnya merugikan orang kampung, karena banyak alat tangkap milik nelayan kampung Ru Sembilan yang rusak bertabrakan dengan kapal-kapal nelayan komersial. Kondisi seperti inilah yang kemudian memicu konflik antara nelayan komersial dengan nelayan kampung Ru Sembilan.

Kapal-kapal moderen dengan peralatan *push net* atau wan rum ini mempunyai kemampuan untuk menangkap ikan di kawasan pantai maupun di perairan laut dalam, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan sumberdaya di sekitar teluk Pattani. (Radwan.2000: 117). Penurunan sumberdaya laut di perairan pantai ini membuat nelayan tradisional kesulitan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain karena beroperasinya *Push net*, penurunan sumberdaya laut juga karena banyaknya kapal-kapal penangkapan ikan yang berlabuh di *Pattani Fishing Port* yang lokasinya tidak jauh dari perairan kampung Ru Sembilan, yang berakibat pada terjadinya pencemaran air laut di kawasan itu.

Konflik nelayan komersial dengan nelayan tradisional di Thailand Selatan sebenarnya bukan hal yang baru, karena sudah berlangsung sejak sebelum tahun 1950-an, namun konflik itu belum setajam yang terjadi pada saat ini. Konsekuensi dari konflik tersebut muncul berbagai macam masalah di kampung Ru Sembilan. Pertikaian bukan hanya antara orang kampung dengan nelayan komersial Siam, tetapi juga dengan sesama nelayan kampung Ru Sembilan karena terjadi kecemburuan penggunaan alat tangkap.

Upaya untuk menyelesaikan konflik dilakukan oleh tiga kabupaten atau Ampe di wilayah Pattani, yaitu Ampe Noncik, Ampe Yarang, dan Saiburi. Ketiga Ampe inilah yang selalu mencari penyelesaian dan mendiskusikan berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan nelayan, terutama tentang menurunnya sumberdaya laut sebagai akibat pengoperasian *push net*. Setiap bulan bahkan juga setiap minggu mereka berkumpul memperbincangkan berbagai cara untuk menertibkan *push net*, baik yang dilakukan oleh nelayan komersial maupun oleh orang kampung Ru Sembilan. Menurut mereka, pihak Kerajaan sering mengulur-ulur janji dan kurang serius dalam menyelesaikan masalah pengoperasian alat tangkap *push net* di perairan teluk Pattani, atau di wilayah penangkapan orang kampung. Tiga bulan sekali mereka membuat musyawarah besar dan hasilnya dilaporkan kepada Prambong (Dinas Perikanan) agar menghapuskan penggunaan *push net* yang merusak itu, tetapi usaha mereka masih belum berhasil.

Sebenarnya masalah penggunaan *push net* atau wan rum sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 1947, yang kemudian diperbarui pada tahun 1997, yang isinya menyatakan larangan keras terhadap penggunaan alat tangkap *push net* di perairan pantai. Pihak Kerajaan juga sudah berupaya untuk menertibkan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan komersial di teluk Pattani dengan menerjunkan kapal-kapal patroli di sana, namun tetap saja terjadi pelanggaran. Nelayan komersial tidak gentar melakukan penangkapan di sekitar teluk Pattani, bahkan mereka memasuki perairan orang kampung untuk mengoperasikan alat tangkapnya. Pada tahun 1995 pernah terjadi perkelahian antara nelayan komersial dengan nelayan orang kampung Ru Sembilan untuk meminta ganti rugi karena alat tangkap mereka mengalami kerusakan. Kenyataannya, mereka justru mendapat perlawanan dengan senjata api. Oleh karena itu orang kampung tidak berani lagi melawan meskipun terjadi pelanggaran, dan mereka hanya dapat berdiam diri, meskipun menyaksikan nelayan komersial masuk ke perairan mereka.

Selain konflik antara nelayan lokal dengan nelayan komersial, penggunaan *push net* juga memicu konflik antara nelayan yang mengoperasikan alat tangkap *push net* dengan yang tidak menggunakan *push net*. Pengoperasian *push net* oleh nelayan lokal itu di tentang oleh nelayan yang lain baik dari kampung Ru Sembilan sendiri maupun dari kampung-kampung lain, karena sangat mengganggu pengoperasian pukuk-pukuk kepiting (ketam) yang sedang beroperasi. Meskipun

demikian, konflik yang terjadi sesama nelayan kampung Ru Sembilan ini selalu dapat diselesaikan oleh kepala desa secara damai sehingga tidak menjurus pada konflik atau kekerasan, sebagaimana yang dialami dengan nelayan komersial Siam.

Selain permasalahan di atas pengoperasian *push net* oleh orang kampung Ru Sembilan juga menimbulkan kecemburuan sosial, karena kehidupan nelayan yang menggunakan *push net* jauh lebih baik dibanding nelayan yang tidak menggunakannya. Mereka dapat memiliki dua sampai tiga perahu, sedangkan nelayan yang tidak menggunakan *push net* hasil tangkapannya bila dijual tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, sehingga mereka sering berhutang kepada toke.

Penggunaan *push net* oleh nelayan kampung Ru Sembilan juga sangat ditentang oleh nelayan dari kampung yang berdekatan, seperti kampung Budi dan kampung Tanjung Pau. Mereka melarang keras nelayan menggunakan *push net* memasuki wilayah penangkapan mereka, dan memberikan sanksi berupa denda sebesar 10.000 bath sampai 15.000 bath bagi yang melanggarnya. Meskipun demikian pelanggaran tetap terjadi berulang kali dan denda tidak membuat mereka jera untuk menggunakannya.

### **Upaya Penghapusan *Push Net* dan Dampaknya bagi Kehidupan Nelayan Tradisional**

Pada tahun 2002 pihak Kerajaan memberikan bantuan modal kepada nelayan pantai dan sekaligus membeli *push net* milik nelayan kampung Ru Sembilan, agar mereka dapat menggantinya dengan peralatan lain yang tidak merusak sumberdaya. Penggantian yang diberikan oleh Kerajaan disesuaikan dengan harga perahu atau mesin yang dimiliki oleh para nelayan. Pemberian uang tersebut dilaksanakan pada tahun 2002 dengan rincian sebagai berikut: Bagi orang kampung yang mempunyai mesin dengan kekuatan 60 tenaga kuda diberi uang penggantian sebesar 50.000 baht, dan bagi nelayan yang tidak menggunakan *push net* diberi bantuan sebanyak 20.000 bath sebagai tambahan modal melaut.

Pada awalnya orang kampung Ru Sembilan yang menggunakan *push net* tidak mau menerima uang penggantian. Karena dianggap tidak sepadan dengan harga peralatan yang mereka miliki, uang 50.000 baht tidak cukup untuk membeli peralatan tangkap yang lain. Mereka

berharap agar Kerajaan mau menambah menjadi 80.000 baht. Oleh karena itu sebanyak 50 nelayan yang menggunakan *push net* menolak menerima uang dari Kerajaan, dan hanya 21 nelayan yang setuju menerima 50.000 baht untuk penggantian peralatan mereka. Tidak setujunya nelayan ini juga berkaitan dengan surat perjanjian yang harus ditanda tangani oleh mereka yang menerima uang sebanyak 50.000 baht. Dalam perjanjian itu dikatakan, "bagi mereka yang telah menerima uang dari pihak Kerajaan, jika terjadi pelanggaran penangkapan ikan dengan menggunakan *push net*, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda sebanyak 80.000 baht. Bagi yang menerima bantuan modal sebanyak 20.000 baht, apabila melanggar, maka akan terkena denda sebesar 50.000 baht".

Adanya dua syarat diatas, maka sebagian besar nelayan kampung Ru Sembilan yang memiliki *push net* belum bersedia menerima uang dari pihak Kerajaan. Mereka mengatakan "Kita orang kampung akan turut patuh terhadap pemerintah Kerajaan, asalkan peraturan ini juga berlaku kepada nelayan komersial. Akan tetapi, kalau hanya kami orang kampung yang berhenti menggunakan alat tangkap *push net*, sementara nelayan komersial masih tetap beroperasi di perairan orang kampung, maka kami tidak rela". Dengan demikian orang kampung menuntut kepada pihak Kerajaan agar berlaku adil kepada semua pihak.

Bagaimanapun juga pada tanggal 4 Maret 2002 alat tangkap *push net* yang dimiliki orang kampung Ru Sembilan akhirnya terpaksa diambil oleh petugas Perikanan. Sekitar 21 nelayan menyerahkan mesin yang berkekuatan 60 tenaga Kuda dengan segala peralatan *push net*nya. Sedangkan nelayan yang menolak, mereka tidak rela menyerahkan peralatan mereka kepada petugas, dan petugas juga tidak berani mengambil secara paksa peralatan orang kampung. Beberapa hari kemudian petugas dari Perikanan datang kepada orang kampung dan memberikan uang sebagai ganti rugi kepada 21 orang nelayan yang telah rela menyerahkan alat tangkap *push net* beserta mesinnya kepada petugas.

Setelah aparat Kerajaan mencoba menghapuskan *push net*, persoalan-persoalan baru mulai muncul dalam kehidupan nelayan kampung Ru Sembilan Karena uang yang diberikan oleh pihak Kerajaan tidak cukup untuk membeli peralatan baru, maka mereka tidak dapat turun ke laut lagi karena tidak mempunyai peralatan lain. Untuk

menutup biaya hidup sehari-hari, terutama untuk makan dan biaya anak-anak sekolah terpaksa berhutang kepada toke atau menjual perhiasan emas miliknya.

Di antara 50 nelayan yang menolak penggantian *push net*, mereka bertekad akan tetap melakukan penangkapan ikan menggunakan *push net* kalau nelayan komersial tidak berhenti, Meskipun demikian mereka takut terhadap ancaman hukumannya, karena perahu mereka bisa disita atau terkena denda. Oleh karena itu, sampai bulan Mei 2002, meskipun peralatan mereka belum diserahkan, mereka tidak berani mengoperasikan *push net*. Akhirnya merekapun berharap agar *push net* mereka diganti dengan uang, walaupun sampai penelitian ini berakhir pada tanggal 30 Mei 2002, uang penggantian *push net* belum juga mereka terima.

Para nelayan kampung Ru Sembilan sangat resah karena mereka tidak dapat turun ke laut. Sebagian nelayan memang masih mempunyai perahu dengan kekuatan mesin 3 PK, namun dengan peralatan seperti itu tidak mudah untuk mendapatkan ikan. Ikan yang dapat ditangkap hanyalah ikan bilis (teri) atau ikan duri yang harganya sangat murah, sehingga hasil penjualan ikan yang diperoleh hanya sekitar 60-100 baht per hari. Hasil sebesar itu tidak cukup untuk membiayai kehidupan keluarga mereka.

Hal yang menyakitkan lagi buat mereka adalah apabila sore hari, mereka masih menyaksikan kapal-kapal besar nelayan komersial mengoperasikan *push net* di perairan teluk Pattani, bahkan pada tengah malam memasuki wilayah perairan mereka. Menyaksikan keadaan tersebut seorang nelayan yang rumahnya terletak di tepi pantai mengeluh, "*kami orang kampung sebagai nelayan kecil diperintahkan untuk berhenti menggunakan alat tangkap push net dan kami sudah berhenti. Namun sebaliknya, nelayan komersial masih tetap saja mengoperasikan push netnya. Inilah yang menyakitkan kami. Kenapa mereka belum berhenti juga sementara kami sebagai nelayan kecil sudah berhenti?*".

Jika menyaksikan kondisi nelayan kampung Ru Sembilan, terlihat ketidakadilan yang mereka rasakan dalam penggunaan alat tangkap *push net*. Meskipun demikian, mereka tampaknya pasrah terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pihak Kerajaan. Bahkan kepala desa tidak dapat banyak berbuat untuk memperjuangkan nasib warganya. Pada saat penelitian berakhir situasi nelayan kampung Ru

Sembilan masih tidak menentu, apakah mereka dapat turun ke laut dengan peralatan yang baru atau tidak.

Sulitnya para nelayan mencari nafkah di laut, istri-istri nelayan yang biasanya membantu suaminya melaut sekarang terpaksa mencari pekerjaan baru sebagai kuli “*merajut pukot*” di pertokoan milik orang Cina di kota Pattani, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Upah yang diperoleh sekitar 100 baht perhari, tanpa ada uang makan dan transpot. Upah itu diterima setiap minggu sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Pekerjaan merajut pukot itu menurut mereka sangat tidak menyenangkan, karena perlakuan Cina Siam yang dianggap kurang manusiawi terhadap mereka. Inilah ungkapan mereka: “*kami bekerja dalam suatu ruangan yang tertutup, sangat panas, dan tidak ada AC atau pun kipas angin. Keringat bercucuran kalau sedang bekerja, dan terasa haus sementara air minum tidak pernah tersedia. Kami harus membelinya, sedangkan mandor mengawasi kami bekerja dengan sangat ketat. Kami bekerja di toko Cina sebagai pengrajin alat tangkap nilon juga menderita, tapi kami terpaksa karena butuh biaya hidup*”.

Terdapat sekitar 80 orang istri nelayan bekerja sebagai buruh pembuat pukot di toko-toko Cina Siam yang tersebar di seluruh kota Pattani. Jam 7 pagi mereka sudah berangkat dari kampung Ru Sembilan dengan kendaraan angkot desa (dalam bahasa setempat disebut oto), sementara suami mereka di rumah mengurus anak-anaknya karena tidak dapat melaut.

## **Kesimpulan**

Pelajaran dari kasus kampung Ru Sembilan adalah "kegagalan" pemerintah Thailand mengelola sumberdaya laut dalam pespektif hukum. Jawatan Perikanan maupun Keamanan, gagal dalam menerapkan tugas yang semestinya diemban bersama. Kegagalan ini telah menimbulkan berbagai macam masalah terutama dalam kehidupan nelayan tradisional.

Masalah-masalah itu adalah: *Pertama*, konflik terus belangsung antara nelayan moderen Cina Siam dengan nelayan tradisional karena penurunan sumberdaya yang cukup mengkhawatirkan. *Kedua*, rusaknya peralatan orang kampung karena terjadinya tabrakan sehingga alat tangkap nelayan tradisional sering mengalami kerusakan tanpa ada ganti

rugi dari pihak nelayan moderen. *Ketiga*, kebijakan pemerintah Thailand dalam menangani konflik antar nelayan terhadap aspek pengelolaan dan pelestarian sumberdaya dianggap tidak adil atau diskriminatif oleh masyarakat kampung Ru sembilan.

Ketidakadilan tersebut tampak pada keberpihakan pemerintah terhadap nelayan moderen yang masih beroperasi di perairan Pattani. Sedangkan di lain pihak sudah dilakukan pelarangan terhadap nelayan tradisional dengan berbagai macam sanksi terhadap mereka. Oleh karena itu nelayan tradisional merasa tidak puas dengan sikap pemerintah. *Keempat*, ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah tidak seimbang dengan nilai alat tangkap yang dimiliki nelayan tradisional, sehingga mereka tidak dapat lagi membeli peralatan yang lain untuk pergi menangkap ikan dalam memenuhi nafkah keluarga. Yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah istri nelayan bekerja menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

#### **Daftar Pustaka**

- Akimichi, Tomoya dan Rudle Kenneth, 1984, "*Maritime Institutions in The Western Pacific*," Seri Ethnological Studies, No. 17, Osaka; National Museum of Ethnology.
- Berkers, Fikret, 1985, "*The Common Property Resources Problem and the Creation of Limited Rights*," Institute of Urban and Environmental Studies, St. Catherine's Ontario, Canada; Brock University.
- Frazer, Jr., M. Thomas, [19--] "*Fisherman of South Thailand; The Malay Villages*," University of Massachusetts, New York.
- Frazer, Jr., M. Thomas, 1960, Rusembilan: "*A Malay Fishing Village in Southern Thailand*", Cornell University Press, Ithaca, New York.
- Hardin, Garret, "*The Tragedy of the Commons* " dalam Majalah Science 162 (n.d); 124-38.
- Imron, Masyhuri dan Surmiati Ali, 1994, "*Aspek-aspek Sosial Budaya Masyarakat Maritim Indonesia Bagian Timur, Hak Ulayat Laut Desa Tablasufa, Kecamatan Depapre, Jayapura, Irian Jaya*," Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, PMB-LIPI.

- Korsieporn, Angkare Ponnachiet, 2000, "*Coastal Fishing Communities in Thailand*," Food Agriculture Organization of the United Nations, Bangkok.
- Polioudakis, Emanuel and Nitiya Poliudakis, 2000, "*Resource Management Social Class, and The State at Muslim Fishing Village in Southern Thailand*," State and Community in Fisheries Management Power, Policy and Practice, University Putra Malaysia.
- Raduan, Mohammad, et. al., 2000, "*Kesan Perkembangan Teknologi Perikanan Modern terhadap Komuniti Nelayan Artisanal di Kampung Rusembilan, Pattani, Thailand*," Jurnal Jabatan Pengkajian Asia Tenggara, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Universiti Malaya.
- Raduan, Mohammad. et. al., 2000 "*Perkembangan Teknologi Perikanan dan Perubahan Peranan Kaum Wanita di Perkampungan Nelayan Artisanal di Kampung Rusembilan, Pattani, Thailand*," Jurnal Jabatan Pengkajian Asia Tenggara, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, University Malaya.
- Retanachai, chulaporn, et. al., 1985; "*Priliminary Study of Socio-economic Status and Living Conditions of The Marine Fishing Households in Ban Bon-(Songkhla)*", Thailand: National Institute of Coastal Aquaculture.
- R, McGoodwin.James, 1990; "*Crisis in the World's Fisheries People, Problems, and Policies*," Stanford University Pre'ss .stanford, california.
- Sudo, Ken-Ichi, 1984, "*Social Organisation and Types of Sea Tenure in Micronesia*," Maritime Institutions in The Western Pacific, Osaka National Museum of Ethnology.